DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

RENCANA KERJA

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, hanya karena berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2023 berhasil diselesaikan.

Penyusunan Ranhir Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap rancangan Rencana Kerja yang nantinya akan disusun menjadi Dokumen Anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan di Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam pada Tahun 2023.

Batam, 22 Juli 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

AZRIL APRIANSYAH, ST, MT
Pembina Tingkat I
Nip. 19730408 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL.....iv
BAB I.....1
PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah.....1
I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 1
I.1.3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya.....3
I.2. Landasan Hukum 3
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah 3
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran 4
I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 8
I.3. Maksud dan Tujuan 12
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah 12
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....12
I.4. Sistematika Penulisan.....13
BAB II.....15
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 15
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....15
II.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
II.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....30
II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah 30
II.3.2 Permasalahan dan Hambatan 30
II.3.3. Peluang dan Tantangan.....31
II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....32
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....34

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat 42
BAB III 43
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 43
III.2. Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2023 43
III.3 Tujuan dan Sasaran Renja Peragkat Daerah 50
III.4. Program dan Kegiatan 50
BAB IV 73
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 73
BAB V 81
PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama 8

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Kunci 9

Tabel 2.1 T-C. 29 16

Tabel 2.2 T-C. 30 29

Tabel 2.3 T-C. 31 34

Tabel 2.4 T-C. 32 42

Tabel 3.1 T-C. 33 52

Tabel 4.1 Tabel Renja 73

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023. Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya, dan mentargetkan capaian kinerja pada Tahun 2023.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa proses tahapan yang harus dilalui. Hal ini juga harus disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang ada.

Tahapan proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

(1). Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

(2). Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

(3). Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta

prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

(4). Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

(5). Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.

(6). Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

(7). Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbangda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

(8). Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

(9). Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

(10). Bapelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah.

(11). Verifikasi sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

(12). Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapelitbangda menyampaikan saran dan

rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

(13). Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

(14). Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbangda.

(15). Setelah verifikasi dilakukan oleh Bapelitbangda dilakukan penetapan Renja Perangkat Daerah yang antinya akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

I.1.3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya

Rencana Kerja OPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di Tahun 2023 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga ada proses penyusunan yang diperoleh dari usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan OPD terkait melalui forum Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD selain guna mencapai tujuan dan sasaran OPD juga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita OPD yakni VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yaitu: "*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi dan Mudah diakses Masyarakat*"

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas komunikasi dan informatika

dimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
37. Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tabel berikut :

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Utama

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan	1.1.	Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE	1.1.1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	persen
				1.1.2.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	persen
				1.1.3.	Indeks Domain Layanan SPBE	persen

	teknologi informasi			1.1.4.	Indeks Domain Manajemen SPBE	persen
		1.2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	1.2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	persen

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti tabel berikut :

Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Kunci

IKK Output	IKK Outcome
1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo. 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. 4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015. 5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar. 6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. 3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. 5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. 6. Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKK Output	IKK Outcome
aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik. 8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik. 9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan. 11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah. 12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah. 13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo). 14. Persentase data yang dapat berbagi pakai. 15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city. 16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.	

IKK Output	IKK Outcome
17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government. 18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. 19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM). 20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan. 21. Tersedianya buku profil daerah. 22. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan. 23. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan. 24. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS. 25. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS. 26. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik. 27. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik. 28. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan.	

IKK Output	IKK Outcome
29. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah. 30. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah. 31. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.	

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2023 disusun dengan maksud untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan mempertimbangkan data yang

telah diinventarisir, permasalahan dan potensi yang ada. Sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan di Kota Batam.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

I.1.2. Proses Penyusunan Renja perangkat Daerah

I.1.3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan

II.3.3. Peluang dan Tantangan

II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022
III.3. Tujuan dan Sasaran Renja Peragkat Daerah
III.4. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2021 alokasi anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebesar Rp 18.747.925.744,00. Alokasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mencapai target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi Tunjangan	33 ASN	32 ASN	32 ASN	100%	33 ASN	33 ASN	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2.01	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	11 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	11 kegiatan	11 kegiatan	100%
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 ASN	ASN	6 ASN	100%	6 ASN	6 ASN	100%
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	46 jenis	52 jenis	52 jenis	100%	46 jenis	46 jenis	100%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	80 kali	40 kali	40 kali	50%	40 kali	40 kali	100%
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang diadakan	O jenis	1 jenis	1 jenis	100%	0 jenis	0 jenis	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	9 jenis	9 jenis	100%
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan							
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot	74.59%	74.59%	74.59%	100%	74.59%	74.59%	100%
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten komunikasi publik yang diproduksi; Jumlah Event Pemko Batam yang dipublikasikan	1185; 5 event	77 ; 5 event	77; 5 event	100%	1108 ; 5 event	1185; 5 event	100%
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi pesan di media komunikasi publik; Jumlah media komunikasi publik pemda yang dikelola (akumulatif); Jumlah laporan evaluasi penggunaan media komunikasi publik	21.007; 4; 12	2.641; 4; 12	2.641; 4; 12	100%	18.366; 4; 12	21.007; 4; 12	100%
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase permintaan informasi yang terlayani; Persentase OPD yang mempublikasikan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (akumulatif); Jumlah pelaksanaan uji konsekuensi;	100%; 64%;2; 75%	100%; 55%; 1; 75%	100%; 55%; 0; 75%	100%; 100%; - ; 100%	100%; 64%; 1; 75%	100%; 64%; 1; 75%	100%; 100%; 50%; 100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti							
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang diterbitkan; Jumlah pemberitaan informasi pembangunan daerah; Jumlah kunjungan ke media; Jumlah pertemuan dengan media; Jumlah pertemuan dengan pemimpin redaksi	1.065; 2.000; 5; 5; 2; 5	528; 1.000; 2; 1; 1; 1	528; 1.000; 2; 1; 1; 1	100%	528; 1.000; 3; 4; 1; 4	528; 1.000; 3; 4; 1; 4	100%
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kerjasama dengan pemangku kepentingan (KIM, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif, dan kelompok strategis) (akumulatif); Persentase layanan NTPD 112 yang terlayani; Persentase layanan	2; 100%; 100%	2; 100%; 100%	2; 100%; 100%	100%	2; 100%; 100%	2; 100%; 100%	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						dokumentasi rekaman CCTV yang terlayani							
2	16	03			PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.40; 3.16	3.00; 3.30; 3.16	2.90; 3.50; 3.17	96.67%; 100%; 100%	3.00; 3.40; 3.16	3.00; 3.40; 3.16	100%; 100%; 100%
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	234	224	224	100%	234	234	100%
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain pemerintah kota Batam yang terdaftar	8	5	5	100%	8	8	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan server nama domain (DNS)	99%	99%	99%	100%	99%	99%	100%
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	20	13	13	100%	20	20	100%
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 ; 3.25	2.75; 2.75	2.75; 2.25	100% ; 81.81%	3.25; 3.25	3.25; 3.25	100%
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan	Jumlah Dokumen Perencanan dan Kebijakan SPBE yang disusun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik								
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan pusat data pemerintah daerah	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah	96%	95%	95%	100%	96%	96%	100%
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan atau dikelola (akumulatif)	37 Aplikasi	35 Aplikasi	35 Aplikasi	100%	37 Aplikasi	37 Aplikasi	100%
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan yang saling terhubung (akumulatif)	4 layanan	3 layanan	3 layanan	100%	4 layanan	4 layanan	100%
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Jumlah ASN yang tersertifikasi IT (akumulatif)	5 ASN	4 ASN	4 ASN	100%	5 ASN	5 ASN	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Komunikasi Pemerintah Daerah								
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	3.00; 3.00	3.00; 3.00	2.00; 3.00	66.67%; 100%	3.00; 3.00	3.00; 3.00	100%; 100%
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	45.83%	34.17%	34.17%	100%	45.83%	45.83%	100%
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan informasi Pemerintahan Kota Batam yang terlaksana	5 kali	3 kali	3 kali	100%	2 kali	5 kali	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	30.48%	18.10%	18.10%	100%	30.48%	30.48%	100%
2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	42.86%	28.57%	28.57%	100%	42.86%	42.86%	100%
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	2	2	2	100%	2	2	100%
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi data Statistik Sektoral berdasarkan urusan pemerintahan konkuren pada UU No 23 Tahun 2014 (akumulatif); Jumlah Diseminasi/Publikasi Data statistik sektoral; Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral	32 urusan; 1 kali; 0%	32 urusan; 1 kali; 0%	32 urusan; 1 kali; 0%	100%	32 urusan; 1 kali; 0%	32 urusan; 1 kali; 0%	100%

II.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot	-	√	74.59%	74.59%	100%	74.59 %	-	74.59%	74.59 %	
Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	-	√	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	-	3.00; 3.30; 3.16	3.00; 3.40; 3.16	3.00; 3.50; 3.16	2.90; 3.50; 3.17	-	3.00; 3.40; 3.16	3.00; 3.50; 3.16	
Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	-	-	224	234	244	224	-	234	244	
Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	-	-	2.75; 2.75	3.25; 3.25	3.25; 3.25	2.75; 2.25	-	3.25; 3.25	3.25; 3.25	
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;	-	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	2.00; 3.00	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi										
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	-	-	34.17%	45.83%	63.75%	34.17 %	-	45.83%	63.75 %	
Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	-	√	28.57%	42.86%	57.14%	28.57 %	-	42.86%	57.14 %	
Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	-	√	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
Persentase data statistik sektoral yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

II.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat dilihat berdasarkan Perjanjian Kinerja. Hal itu dapat dilihat juga dari target dan realisasi sasaran dan indikator Kinerja yang ada di Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026, seperti pada tabel T-C. 30 diatas.

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Rencana Induk, Arsitektur dan Kebijakan SPBE yang berperan atas perencanaan, anggaran, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan Penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi di

Dinas Komunikasi dan Informatika seperti akses internet dan infrastruktur pendukungnya.

3. Pengelolaan data dinamis secara elektronik diberbagai Organisasi Perangkat Daerah masih sangat minim. Saat ini, Perangkat Daerah mengembangkan berbagai aplikasi atau sistem informasi secara sporadis. Namun tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada duplikasi investasi di bidang pembangunan sistem informasi dan ketidak efektifnya pencapaian e-government yang dituju.
4. Pengelolaan data dinamis secara elektronik diberbagai Organisasi Perangkat Daerah masih sangat minim. Saat ini, opd mengembangkan berbagai aplikasi atau sistem informasi secara sporadis. Namun tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada duplikasi investasi di bidang pembangunan sistem informasi dan ketidak efektifnya pencapaian e-government yang dituju.
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penyelenggaraan urusan Kominfo dalam hal ini berupa Command Centre (Pusat kendali berbasis Teknologi Informasi).
6. Ketersediaan data statistik yang komprehensif dan terkini juga masih belum optimal. Kemampuan survey dan kompilasi data statistik yang masih belum memadai menyebabkan pemerintah kota memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan semua data statistik yang akurat.

II.3.3. Peluang dan Tantangan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan
   a. Kesenjangan informasi di masyarakat di Kota Batam;
   b. Pesatnya perkembangan TIK;
   c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kota Batam;
   d. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kota Batam terhadap TIK;

e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System dan Buku Statistik Sektoral;
f. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Batam melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi

2. Peluang
   a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Batam berbasis teknologi informasi;
   b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerahdi Kota Batam;
   c. Kesadaran masyarakat Kota Batam akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
   d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam berbasis elektronik;

II.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Diskominfo Pemerintah Kota Batam yaitu :

1. Belum adanya Rencana induk, Arsitektur dan kebijakan SPBE yang berperan atas perencanaan, anggaran, penyelarasan, penyiapan,implementasi dan wvaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
2. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
3. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
4. Pengelolaan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika seperti akses internet dan infrastruktur pendukungnya;

5. Pengumpulan dan Pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemko Batam belum belum terlaksana secara optimal;
6. Kerjasama antar instansi dan diseminasi data statistik sektoral belum terlaksana secara optimal.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. 3 T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BATAM			**9,031,083,850**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	BATAM	**Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**	**100 %**	**9,225,563,486**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BATAM			**7,870,487,683**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BATAM	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**7,563,487,766**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BATAM			**68,554,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	BATAM	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**56,107,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Perangkat Daerah yang terpenuhi			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BATAM			**231,286,227**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BATAM	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**395,252,000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BATAM			**476,963,500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	BATAM	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**755,234,600**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BATAM			**94,645,440**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BATAM	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**135,317,120**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BATAM			**289,165,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BATAM	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100%**	**320,165,000**	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BATAM			**8,044,972,934**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	BATAM	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**74.59 %**	**7,873,571,006**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BATAM			**8,044,972,934**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	BATAM	**Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	100%	7,873,571,006	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**6,228,391,500**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik**	**3 Indeks 3.50 Indeks 3.16 Indeks**	**6,693,468,833**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**2,001,291,500**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah**	**244 layanan elektronik**	**2,048,998,740**	
	Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**4,227,100,000**	**Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola**	**3.25 Indeks**	**4,644,470,093**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	BATAM			**200,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	BATAM	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah**	**100 %**	**87,133,250**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	BATAM			**200,000,000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	BATAM	**Persentase data statistik sektoral yang tersedia**	**100%**	**87,133,250**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	BATAM			**104,724,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**	BATAM	**Tingkat Kematangan Kebijakan Internal**	**3 Level 3 Level**	**104,638,300**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					**UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**			
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BATAM			**101,724,000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	BATAM	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda**	**63.75 %**	**101,286,300**	
	Penetapan Pola Hubungan	BATAM			**3,000,000**		BATAM	**Persentase Pola Hubungan**	**57.14 %**	**3,352,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							**Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan**			

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja, salah satu yang menjadi bahan penyusunan adalah usulan masyarakat. Akan tetapi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak mendapatkan usulan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kota Batam.

Musrenbang yang telah dilalui ketika pembahasan tentang Dinas Komunikasi dan Informatika cuma membahas tentang hal-hal yang tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam seperti pertanyaan tentang sinyal Operator seluler, sinyal internet dan permasalahan tower BTS(Base Transceiver Station).

Tabel 2. 4 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan persiapan 5 (lima) program prioritas guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, sehingga mendorong masyarakat Tanah Air menjadi masyarakat digital.

Kelima program tersebut terdiri dari:

- Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Pengelolaan spektrum frekuensi;
- Pemanfaatan TIK;
- Penataan Pos dan Informatika;
- Komunikasi Publik.

Dengan adanya pandemic Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital nasional. Selain itu Kemenkominfo melakukan percepatan infrastruktur dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) serta akses internet diwilayah non-komersial. Kemenkominfo juga melakukan persiapan pusat data nasional sebagai Langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik. Kemenkominfo juga menargetkan seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia sudah terjangkau dengan layanan 4G. Dan mentargetkan 25% dari total pengguna smartphone saat ini di Indonesia menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.sumber; Medcom.id.

III.2. Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2023

Tema

Tema Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2023 adalah '*Pemantapan Infrastruktur Perkotaan untuk Meningkatkan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah*'

Tujuan

Tujuan Pembangunan Kota Batam adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya

saing. Tujuan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan misi pertama, yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, khususnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan.

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif. Tujuan ini pun mendukung penyelenggaraan misi pertama. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang berkeadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif, serta terukur dari indikator pemerataan pendapatan (indeks gini atau rasio gini) yang semakin mengecil.
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi kedua. Cakupan tujuan ini meliputi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan perkotaan serta permukiman, penataan ruang kota dan peningkatan kualitas lingkungan. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan yang relatif tinggi dan meningkat/stabil dari tahun ke tahun. Mengingat cakupan infrastruktur di tujuan ini difokuskan ke wilayah perkotaan (Mainland), maka indikator tujuan secara eksplisit menyebutkan wilayah Perkotaan.
4. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi ketiga, yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Cakupan tujuan ini meliputi upaya meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta urusan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Upaya lain dalam mencapai tujuan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan identik dengan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Karenanya, ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang semakin meningkat serta Persentase Penduduk Miskin yang menurun dan relatif rendah dari tahun ke tahun.
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ke empat. Cakupan tujuan ini

meliputi percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan serta permukiman di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah nilai Indeks Infrastruktur wilayah hinterland yang relatif tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerataan pembangunan antara wilayah Perkotaan (mainland) dengan hinterland juga dapat tercermin dari kesenjangan antara nilai indeks infrastruktur wilayah kedua wilayah yang semakin menurun setiap tahunnya.

6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi kelima pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang. Cakupan tujuan ini meliputi berbagai upaya reformasi birokrasi melalui pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang baik, peningkatan kemandirian keuangan daerah, serta pelayanan publik yang prima dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ukuran keberhasilan tujuan ke enam ini adalah indeks reformasi birokrasi yang relatif tinggi dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sasaran

Sasaran Pembangunan Kota Batam adalah:

1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sub sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran, namun bukan perdagangan mobil dan sepeda motor. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor pendukung pariwisata di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Subsektor yang dimaksud meliputi sub sektor akomodasi, makanan dan minuman. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan realisasi investasi daerah, baik yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
4. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset industri kecil dan menengah di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
5. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset koperasi dan usaha mikro di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
6. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya. Ukuran dari ketercapaian sasaran ini adalah nilai tukar nelayan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
7. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan kawasan atau kluster kreatif daerah yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
8. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang

diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan persentase pengelolaan sampah yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
10. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan, serta Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
11. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Pendidikan serta Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
12. Meningkatnya aksebilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kesehatan masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
13. Meningkatnya daya beli masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Tingkat DayaBeli (Purchasing Power Parity) masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

14. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan. Terdapat dua ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan. Nilai kedua ukuran/indikator tersebut diharapkan meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
15. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan berbagai potensi konflik maupun pelanggaran di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kelima yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
16. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Skor Pola Pangan Harapan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keenam yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
17. Menurunnya angka pengangguran. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam yang menurun dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketujuh yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
18. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedelapan yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
19. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
20. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

21. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
22. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas. Terdapat empat ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kota Batam, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam, Nilai Tata Kelola Kearsipan, dan Tingkat Maturitas Satuan Pengawas Internal Pemerintahan (SPIP) Kota Batam. Ketercapaian sasaran tercermin dari status atau nilai yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
23. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
24. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terdapat tiga ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketercapaian sasaran tercermin dari nilai ukuran/indikator yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

III.3 Tujuan dan Sasaran Renja Peragkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi"

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE;
2. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;

III.4. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan 5 (lima) program, yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung 6 kegiatan :
   1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 kegiatan :
   1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung 2 kegiatan :
   1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
   2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah.
D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung 1 kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 2 kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 1 T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**	**BATAM**	**100 %**	**9,225,563,486**			**100%**	**9,031,083,850**
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**BATAM**	**100 %**	**7,563,487,766**			**100%**	**7,870,487,683**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BATAM	490 Orang/bulan	7,516,227,766	PAD dan DAU		490 Orang/ bulan	7,823,227,683
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BATAM	1 Dokumen	47,260,000	PAD		1 Dokumen	47,260,000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**BATAM**	**100 %**	**56,107,000**			**100%**	68,554,000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	BATAM	6 orang	56,107,000	PAD		6 Orang	68,554,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pendidikan dan Pelatihan							
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**BATAM**	**100%**	**395,252,000**			**100%**	**231,268,227**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BATAM	1 Paket	9,484,000	PAD		1 Paket	9,510,432
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	BATAM	5 Paket	78,807,000	PAD		5 Paket	78,815,795

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kantor yang Disediakan							
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BATAM	1 Paket	6,000,000	PAD		1 Paket	6,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BATAM	1 Paket	13,075,000	PAD		1 Paket	13,076,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BATAM	1 laporan	287,886,000	PAD		1 Laporan	123,866,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**BATAM**	**100%**	**755,234,600**			**100%**	**476,963,500**
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BATAM	52 Unit	755,234,600	PAD		52 Unit	476,963,500
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan**	**BATAM**	**100%**	**135,317,120**			**100%**	**94,645,440**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Daerah yang terpenuhi							
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BATAM	1 Laporan	6,210,000	PAD		1 Laporan	9,666,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BATAM	1 Laporan	129,107,120	PAD		1 Laporan	84,979,440
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemeliharaan**	**BATAM**	**100%**	**320,165,000**			**100%**	**289,165,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Urusan Pemerintah daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**							
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BATAM	7 Unit	250,475,000	PAD		7 Unit	219,475,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BATAM	6 Unit	69,690,000	PAD		6 Unit	69,690,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**BATAM**	**74.59 %**	**7,873,571,006**			**74.59 %**	**8,309,786,363**
2	**16**	**02**	**2.01**		**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran**	**BATAM**	100%	7,873,571,006			100%	8,309,786,363

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**penyebaran informasi publik**							
2	16	01	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	BATAM	2 Dokumen	76,459,707	PAD		2 Dokumen	275,000,000
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	BATAM	2 Dokumen	73,022,707	PAD		2 Dokumen	82,500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	BATAM	62 Dokumen	976,830,790	PAD		62 Dokumen	945,652,196
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	BATAM	62 Dokumen	5,385,485,802	PAD		62 Dokumen	5,808,049,480
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	BATAM	12 Dokumen	269,760,000	PAD		12 Dokumen	37,507,050
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	BATAM	1 Layanan	540,834,400	PAD		1 Layanan	591,700,24

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	BATAM	1 Dokumen	551,177,600	PAD		1 Dokumen	569,377,392
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai Indeks Aspek Layanan Publik**	**BATAM**	**3 Indeks 3.50 Indeks 3.16 Indeks**	**6,693,468,833**			**3 Indeks 3.50 Indeks 3.16 Indeks**	**6,321,790,500**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Berbasis Elektronik							
2	**16**	**03**	**2.01**		**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah**	**BATAM**	**244 layanan elektronik**	**2,048,998,740**			**244 layanan elektronik**	**2,075,450,500**
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	BATAM	8 Domain	2,235,576	PAD		8 Domain	2,331,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	BATAM	1 Dokumen	74,428,800	PAD		1 Dokumen	62,000,000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	BATAM	24 Unit	1,972,334,364	PAD		24 Unit	2,011,119,500
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah**	**Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE**	BATAM	**3.25 Indeks**	**4,644,470,093**			**3.25 Indeks**	**4,246,340,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kabupaten/Kota	**pada Domain Tata Kelola**							
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	BATAM	1 Dokumen	71,567,500	PAD		1 Dokumen	100,000,000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	BATAM	1 Unit	141,723,000	PAD		1 Unit	103,440,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	BATAM	1 Dokumen 97 %	1,550,668,000	PAD		1 Dokumen 97 %	1,492,920,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	BATAM	38 Unit	2,647,874,143	PAD		38 Unit	2,170,000,000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem	BATAM	4 Layanan	60,741,450	PAD		4 Layanan	129,980,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Penghubung Layanan Pemerintah Daerah							
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	BATAM	1 Dokumen	85,052,000	PAD		1 Dokumen	100,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	BATAM	10 Dokumen	86,844,000	PAD		10 Dokumen	150,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						dan Komunikasi Pemerintah Daerah							
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah**	BATAM	**100 %**	**87,133,250**			**100%**	**165,696,000**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di**	**Persentase data statistik sektoral yang tersedia**	BATAM	**100%**	**87,133,250**			**100%**	**165,696,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	BATAM	1 Dokumen	87,133,250	PAD		1 Dokumen	165,696,000
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Tingkat**	BATAM	**3 Level 3 Level**	**104,638,300**			**3 Level 3 Level**	**108,452,174**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi							
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda**	BATAM	**63.75 %**	**101,286,300**			**63.75 %**	**105,339,000**
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	BATAM	1 Laporan	55,213,000	PAD		1 Laporan	57,639,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	BATAM	2 Perangkat Daerah	46,073,300	PAD		2 Perangkat Daerah	47,700,000
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan**	BATAM	**57.14 %**	**3,352,000**			**57.14%**	**3,113,174**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	BATAM	2 Perangkat Daerah	3,352,000	PAD		2 Perangkat Daerah	3,113,174

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan "Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat" sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Tabel Renja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**	**100 %**	**9,225,563,486**
Administasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**7,563,487,766**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	7,516,227,766
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	47,260,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**56,107,000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	56,107,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**395,252,000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,484,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	78,807,000
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13,075,000
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	287,886,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**755,234,600**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	755,234,600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**135,317,120**
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6,210,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129,107,120
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100%**	**320,165,000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	250,475,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	69,690,000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan**	**74.59 %**	**7,873,571,006**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	pemerintah daerah kabupaten/kota		
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	100%	7,873,571,006
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	76,459,707
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	73,022,707
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	62 Dokumen	976,830,790
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	62 Dokumen	5,385,485,802
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	269,760,000
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	540,834,400
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	551,177,600
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**3 Indeks 3.50 Indeks 3.16 Indeks**	**6,693,468,833**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah**	**244 layanan elektronik**	**2,048,998,740**
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Domain	2,235,576
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	74,428,800
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	24 Unit	1,972,334,364
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah **Kabupaten/Kota**	**Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola**	**3.25 Indeks**	**4,644,470,093**
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	71,567,500
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	141,723,000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen 97 %	1,550,668,000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	38 Unit	2,647,874,143
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Layanan	60,741,450
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	85,052,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Dokumen	86,844,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah**	**100 %**	**87,133,250**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase data statistik sektoral yang tersedia**	**100%**	**87,133,250**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	87,133,250
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**	**3 Level 3 Level**	**104,638,300**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda**	**63.75 %**	**101,286,300**
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	55,213,000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	46,073,300
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan**	**57.14 %**	**3,352,000**
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang	2 Perangkat Daerah	3,352,000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilaksanakan tahunan yang merupakan titik awal pelaksanaan program dan kegiatan OPD berguna sebagai pedoman dalam mencapai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Pembanguan Jangka Menegah Daerah RPJMD 2016-2021. Dokumen Rancangan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara subtansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan OPD pada tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Renja ini dirasa jauh dari kesempurnaan, diharapkan adanya masukan, kritikan yang bisa memperbaiki pembuatan Renja- renja dimasa yang akan datang.

Batam, 22 Juli 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

AZRIL APRIANSYAH, ST, MT
Pembina Tingkat I
Nip. 19730408 200212 1 005